

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dengan didukung oleh lajunya pertumbuhan penduduk yang kian meningkat. Sudah sepatutnya menjadi modal untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat yang bersifat multipolar. Beragamnya latar belakang suku, budaya, serta kondisi geografis dan sumber daya alam di Indonesia, melahirkan berbagai kebutuhan dalam berbagai aspek hidup masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data dari Bappenas 2019 (<http://www.bapennas.go.id>), Indonesia menempati posisi ke empat sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia setelah Cina, India dan Amerika. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, tentunya kebutuhan primer maupun sekunder penduduk Bangsa Indonesia semakin meningkat.

Minimnya lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengangguran di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang bersifat multipolar dan tidak tampak seluruhnya. BPS mencatat (<http://www.bps.go.id>) sp 2020, jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2019 adalah sebesar 5,28% atau mencapai 7,05 juta orang. Angka pengangguran tersebut naik secara jumlah dibandingkan dengan pada Agustus 2018, yakni sebesar 7 juta orang pengangguran.

Berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2015 (<http://www.bapennas.go.id>), jumlah penduduk Indonesia Tahun 2019 adalah sebanyak 267 juta jiwa, sedangkan untuk tahun 2020 diproyeksikan akan meningkat ke jumlah 269,6 juta jiwa. Di lain pihak, data pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal I/2020 tumbuh melambat sebesar 2,97 persen. Atau bila dibandingkan dengan kuartal IV/2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 2,41 persen.

Dari deskripsi data di atas dapat dilihat bahwa peningkatan pertumbuhan penduduk Indonesia tidak dibarengi dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi kehidupan ekonomi sosial bangsa Indonesia saat ini masih jauh dari kesejahteraan. Kondisi ini, memotivasi masyarakat Indonesia untuk melakukan berbagai cara untuk menanggulangi persoalan kemiskinan. Untuk menjawab persoalan tersebut, salah satunya adalah dengan jalan meningkatkan potensi sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia Indonesia dapat ditingkatkan dengan cara mengembangkan keterampilan (*skill*) agar dapat menciptakan lapangan kerja, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Berpijak pada persoalan di atas maka, Direktorat Jederal Pajak (DJP) menggandeng 27 instansi untuk bekerja sama dalam membina usaha mikro dan menengah (UMKM) terkait materi perpajakan, pembukuan, dan pencatatan. Seluruh pihak menandatangani kerja sama tersebut di kantor pusat

DJP Jakarta. Dari 27 instansi tersebut, 21 diantaranya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara itu, enam instansi lainnya terdiri dari beberapa asosiasi dan perkumpulan. Sejumlah institusi yang bekerja sama dengan DJP untuk membina UMKM diantaranya PT. Angkasa Pura I (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembinaan UMKM sangat penting karena sektor tersebut menyumbang lebih dari 50% terhadap ekonomi dalam negeri. Lapangan pekerjaan kini banyak dari UMKM. Maka itu, UMKM menjadi salah satu sumber penting dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pembayaran pajak. (CNN Indonesia).

Sedangkan menurut Irma Setyawati 2009, dalam Jurnalnya “Peran Usaha UMKM dalam Perekonomian Nasional’ mengatakan bahwa peran UMKM dalam perekonomian Indonesia atau Nasional, paling tidak dapat dilihat dari: 1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, 2) penyedia lapangan kerja terbesar, 3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, 4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta 5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM diperoleh pengertian bahwa: usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau baik menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih.

UMKM sudah terealisasi baik secara Nasional maupun lokal, hal ini dikarenakan UMKM memberikan banyak peluang bagi seluruh masyarakat Indonesia maupun Daerah Kabupaten Malaka pada khususnya. Salah satunya melalui KUR. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang *Feasible* tapi belum *Bankable*. Maksud dari *Feasible* dan *Bankable* adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan meski belum masuk dalam kategori memenuhi persyaratan bank. Dan yang menjadi pelaku dalam UMKM di Kabupaten Malaka adalah seluruh masyarakat Malaka yang ingin menjalankan UMKM yang telah bermitra dengan BANK-BANK untuk membantu perekonomian masyarakat Kabupaten Malaka melalui Program KUR.

Tujuan dari KUR sendiri adalah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, karena dengan program ini masyarakat bisa melakukan kreativitas di bidang usaha ekonomi mikro, kecil maupun menengah. Salah satu Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Bank NTT. Dalam penelitian ini perhatian peneliti difokuskan pada Bank NTT Cabang Betun Kabupaten Malaka, yang sudah banyak memberikan perkreditan pada masyarakat. Dengan demikian, Program KUR sangat membantu masyarakat Indonesia pada umumnya,

khususnya Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Malaka adalah salah satu kabupaten dari provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan Daerah Otonomi Baru yang mekar dari Kabupaten Belu pada Tahun 2013 melalui undang-undang nomor 13 Tahun 2013 tanggal 11 Januari 2013. Kabupaten Malaka memiliki letak strategis karena berbatasan darat/ langsung dengan Negara Timor Leste dan laut berbatasan dengan Negara Australia. Oleh karena letak yang strategis maka Kabupaten ini sebenarnya pantas untuk dijadikan salah satu pintu transit jalur perdagangan internasional, sehingga dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi perkembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Kabupaten Malaka pada khususnya.

Meskipun terhitung baru dimekarkan menjadi kabupaten, namun Daerah Malaka sendiri sudah dihuni dan berkembang sejak masih berstatus kecamatan sebagai bagian dari Kabupaten Belu. Jumlah total penduduk yang mendiami Kabupaten Malaka, dapat dilihat di tabel berikut:

**Tabel 1**

Jumlah Penduduk Kabupaten Malaka Tahun 2019

	Laki-Laki	Perempuan	Total
2019	97,4 ribu jiwa	96,9 ribu jiwa	194,300 ribu jiwa

Sumber <http://ntt.bps.go.id/subject/23/kemiskinan>

Berdasarkan Jumlah Penduduk, Presentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan dari tahun 2015-2019 menurut Data BPS Kabupaten Malaka dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2**

Data BPS Kabupaten Malaka Berdasarkan Presentasen Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan dari tahun 2015-2019.

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	% Penduduk Miskin
1	2015	279,799	252.005	17,28
2	2016	302,548	263.659	16,66
3	2017	312,052	279.799	16,52
4	2018	330,899	302.584	9,61
5	2019	348,919	321.052	16,12

Sumber : <http://malakakab.bps.go.id>

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa presentase penduduk miskin di Kabupaten Malaka dari Tahun 2015-2019 mengalami penurunan namun belum signifikan. Bisa dilihat dari jumlah penduduk miskin yang terus meningkat, dan secara presentasi sempat mengalami penurunan (Tahun 2018), namun kembali naik di tahun berikutnya (Tahun 2019). Berdasarkan situasi ini diharapkan ada program yang dicanangkan oleh Pemerintah baik pusat maupun Daerah untuk mengatasi lajunya peningkatan angka kemiskinan yang ada, dengan salah satu program yakni Kredit Usaha Rakyat.

Perekonomian di Kecamatan Malaka Tengah ditopang oleh usaha-usaha kecil yang dimiliki oleh warganya. Mayoritas penduduk bertahan hidup dengan berdagang baik sembako, pedagang ayam ras, pedagang tahu dan lain sebagainya. UMKM di Kecamatan Malaka Tengah masih terkendala dengan modal sehingga dengan adanya program KUR, usaha-usaha kecil dapat terbantu dalam mengembangkan usahanya.

Program KUR merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM di Kecamatan Malaka Tengah. Program ini dilaksanakan langsung oleh Bank NTT Cabang Betun, dan sudah terealisasi selama dua tahun. Sasaran pemberian kredit hanya kepada usaha mikro dan usaha kecil dengan plafon pinjaman usaha mikro yaitu 1 juta sampai dengan 25 juta sedangkan usaha kecil dari 25 juta sampai dengan 500 juta. Dengan adanya program KUR ini, pelaku UMKM di Kecamatan Malaka Tengah memperoleh tambahan modal yang berdampak positif dalam mengembangkan usahanya.

Berpijak pada realita di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BANK NTT Cabang Betun, Kantor Kas Raihenek Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana program pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kredit usaha rakyat pada BANK NTT cabang pembantu Betun Kabupaten Malaka?
2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi program pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kredit usaha rakyat pada BANK NTT Cabang pembantu Betun Kabupaten Malaka.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berpijak pada latar belakang dan rumusan masalah di atas maka, adapun tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui program pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kredit usaha rakyat pada BANK NTT cabang Betun Kabupaten Malaka.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi program pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kredit usaha rakyat.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1). Agar penelitian ini, selain menambah pengalaman peneliti di lapangan juga dapat berguna bagi pengembangan khazanah keilmuan khususnya dalam pemberian pengetahuan dalam rangka

mewujudkan insan akademis yang cerdas dan berpengaruh luas.

- 2). Sebagai referensi bagi perguruan tinggi khususnya Jurusan Administrasi Publik di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

**b. Kegunaan Praktis**

- 1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan arahan ataupun informasi sebagai rujukan dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 2). Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitiselanjutnya.